

DINAMIKA POLITIK DAN MILITER DALAM HISTORIOGRAFI ISLAM: TELAAH ATAS KITAB FUTUH AL-BULDAN KARYA ALBALADHURI 850-870 M

Mushab Al-Muqri^a, Safari Daud^b, Wahyu Iryana^c

mushabmuqri188@gmail.com, safari@radenintan.ac.id, wahyu@radenintan.ac.id

^{a b c} UIN Raden Intan Lampung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Received: 2nd June 2026

Revised: 11th August 2026

Accepted: 12th August 2026

Published: 13th August 2026

Permalink/DOI

<https://doi.org/10.51190/jazirah.v7i1.386>



This work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Print ISSN: 2716-4454,
Online ISSN: 2774-3144

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji dinamika politik dan militer dalam historiografi Islam melalui Futuh al-Buldan, karya monumental Ahmad ibn Yahya al-Baladhuri yang disusun pada masa pertengahan Kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-9. Kitab ini merupakan salah satu karya historiografi Islam klasik yang mendokumentasikan penaklukan wilayah-wilayah Islam sejak abad ke-7 M sekaligus memuat informasi mengenai kebijakan politik, sistem administrasi, perpajakan, perjanjian damai, dan tata kelola pemerintahan di wilayah taklukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis narasi politik dalam Futuh al-Buldan serta menjelaskan kontribusinya terhadap pembentukan diskursus kekuasaan dalam historiografi Islam awal. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer penelitian adalah Futuh al-Buldan karya Ahmad ibn Yahya al-Baladhuri, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Futuh al-Buldan merupakan salah satu sumber primer terpenting dalam kajian sejarah penaklukan Islam pada abad ke-7 hingga awal abad ke-9 M. kitab ini tidak hanya menyajikan kronologi ekspansi wilayah Islam, tetapi juga merekam konsolidasi kekuasaan melalui kebijakan administrasi, hubungan diplomatik, perjanjian damai. Temuan ini menegaskan bahwa Futuh al-Buldan memiliki nilai historis dan historiografi yang tinggi serta relevan sebagai rujukan utama dalam kajian sejarah, politik dan pemerintahan Islam klasik maupun dalam pengembangan studi historiografi Islam kontemporer.

KATA KUNCI

Futūḥ al-Buldān ; Aḥmad ibn Yaḥyā al-Balādhurī; sejarah Islam; dinamika politik; penaklukan Islam; Kekhalifahan Abbasiyah

ABSTRACT

*This article examines the political and military dynamics in Islamic historiography through *Futuh al-Buldan*, the monumental work of Ahmad ibn Yahya al-Baladhuri, which was compiled during the mid-Abbasid Caliphate in the 9th century. This book is one of the classic works of Islamic historiography that documents the conquests of Islamic territories since the 7th century CE and also provides information on political policies, administrative systems, taxation, peace treaties, and governance in the conquered regions. This study aims to analyze the political narrative in *Futuh al-Buldan* and explain its contribution to the formation of discourse on power in early Islamic historiography. The research uses historical methods, including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The primary source of this study is *Futuh al-Buldan* by Ahmad ibn Yahya al-baladhuri, while secondary sources are obtained from books, articles, and prior relevant. Research results show that *Futuh al-Buldan* is one of the most important primary sources in the study of Islamic conquests from the 7th to the early 9th century CE. This book not only presents the chronology of Islamic territorial expansion but also records the consolidation of power through administrative policies, diplomatic relations, and peace treaties. These findings confirm that *Futuh al-Buldan* has high historical and historiographical value and remains relevant as key reference in the study of history, politics, and governance of classical Islam, as well as in the development of contemporary Islamic historiography studies.*

KEYWORDS

Futūḥ al-Buldān; Ahmad ibn Yahya al-Baladhuri; Islamic history; political dynamics; Islamic conquests; Abbasid Caliphate.

PENDAHULUAN

Penulisan sejarah dalam tradisi Islam awal memiliki peranan penting dalam memahami dinamika politik, sosial, dan budaya yang membentuk fondasi peradaban Islam. Menurut Hugh Kennedy, karya al-baladhuri ini merupakan salah satu sumber primer terpenting dalam kajian sejarah penaklukan Arab-Islam. Kitab ini tidak hanya menguraikan ekspansi militer, tetapi juga memuat informasi mengenai pembentukan negara awal Islam, sistem pemerintahan, kepemilikan tanah, perkembangan ekonomi, dan administrasi wilayah taklukan. Selain itu, al-baladhuri menghimpun berbagai riwayat dari sumber-sumber awal yang sebagian besar telah hilang, sehingga Futuh al-Buldan menjadi rujukan utama dalam memahami proses terbentuknya peradaban Islam awal.¹

Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, penulisan sejarah tidak hanya berfungsi sebagai sarana dokumentasi, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi kekuasaan dan penyebaran ideologi politik. Dalam kitab Futuh al-Buldan, menekankan bahwa keberhasilan ekspansi Islam tidak hanya di dorong oleh kekuatan militer saja, tetapi juga melalui strategi diplomasi, perjanjian damai, dan pengelolaan administrasi yang adaptif terhadap masyarakat taklukan.

Seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan, muncul kebutuhan untuk merekam peristiwa-peristiwa tersebut secara sistematis. Dalam konteks ini, historiografi Islam mulai berkembang pesat, salah satunya melalui karya-karya seperti kitab Futuh al-Buldan karya Ahmad ibn Yahya al-Baladhuri. Al-Baladhuri menyusun dokumentasi historis mengenai penaklukan berbagai daerah, perjanjian damai, pengaturan fiskal, serta struktur administratif yang diterapkan pasca-penaklukan.² Menurut Patricia Crone bahwa keberhasilan ekspansi Islam awal bukan hanya karena superioritas militer, tetapi juga kecanggihan strategi politik dan administrasi Islam dalam mengelola wilayah baru.³ Hal ini menunjukkan bahwa penaklukan yang dilakukan oleh umat Islam tidaklah bersifat satu dimensi, melainkan mencakup berbagai aspek strategis yang kompleks.

Ia tidak menonjolkan heroisme semata, melainkan menyoroti realitas diplomasi, dan ekonomi seperti sistem pajak (Jizyah), serta pengelolaan keuangan negara sebagaimana juga di bahas dalam karya Abu Yusuf, dalam kitabnya yang berjudul Al-Kharaj.⁴ Lebih jauh, Robert Hoyland menyebut bahwa historiografi Islam awal cenderung bersifat pragmatis: fokus pada peristiwa yang memiliki relevansi politik dan sosial dibanding penyajian

¹ Hugh Kennedy, *History of the Arab Invasions: The Conquest of the Lands*, 2022.

² Ryan J. Lynch, *Arab Conquests and Early Islamic Historiography: The Futuh Al-Buldan of Al-Baladhuri*, 2020.

³ Patricia Crone, *Slaves on Horses The Evolution Of The Islamic Polity*, 1980.

⁴ Abu Yusuf, *Al-Kharaj*, 1965.

sejarah naratif yang objektif. Dengan demikian, kajian terhadap Futuh al-Buldan menjadi sangat relevan dalam konteks historiografi Islam klasik dan kontemporer, terutama dalam melihat dinamika dan militer di balik ekspansi wilayah Islam dan konstruksi historiografi di bawah naungan kekhalifahan Abbasiyah.⁵

Namun, banyak kajian historiografi selama ini lebih berfokus pada aspek naratif penaklukan, sementara dimensi politik dan militer di balik penyusunan historiografi tersebut masih kurang mendapatkan perhatian akademik yang memadai, padahal seperti yang diungkapkan Chase F. Robinson, historiografi Islam awal sering kali berfungsi sebagai alat untuk membangun wacana legitimasi kekuasaan, bukan sekedar pencatatan fakta sejarah.⁶

Kemudian yang unik dari Baladhuri adalah kecenderungannya yang anti-glorifikasi. Ia tidak melulu mengagungkan jihad, melainkan justru menekankan pada aspek administratif, perjanjian damai, penarikan Jizyah, dan diplomasi. Dengan kata lain ia menghadirkan realitas yang rumit daripada hitam-putih perang suci. Satu hal yang menjadi pusat perhatian dalam Futuh al-Buldan adalah bagaimana setiap keputusan politik yang lebih besar. Misalnya, penaklukan Damaskus bukan hanya kemenangan militer Khalid ibn Walid, tetapi juga hasil dari jaringan aliansi lokal dan perjanjian dengan elite-elite Bizantium-Suriah yang kecewa dengan Konstantinopel.⁷

Historiografi al-Baladhuri juga perlu dibaca dalam konteks lebih luas sebagai dari tradisi historiografi Islam klasik yang berkembang bersamaan dengan karya-karya sejarawan lain seperti Ibn Sa'ad, Khalifah ibn Khayyat, dan al-Tabbari. Menurut Robert Hoyland, historiografi Islam awal memiliki karakteristik pragmatis, dimana penulis lebih peduli pada dokumentasi peristiwa yang relevan dengan legitimasi sosial-politik, ketimbang penyusunan sejarah naratif yang murni faktual.⁸

Penelitian terdahulu mengenai Telaah kitab Futuh al-Buldan berfokus menjelaskan bagaimana sejarah historiografi Islam yang membahas Islam awal dan ideologi, geografi yang bertepatan pada masa kekhalifahan Abbasiyah.⁹ Kajian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan fokus terhadap Dinamika politik dan militer dalam historiografi Islam telaah Furuḥ al-Buldan, serta memanfaatkan sumber-sumber seperti manuskrip dan buku-buku untuk

⁵ Robert G Hoyland, *Seeing Islam As Others Saw It* (The Darwin Press, Inc., 1997).

⁶ Chase F. Robinson, *Islamic Historiography*, 2000.

⁷ wahyu Iryana, "Dinamika Politik Dan Militer Dalam Historiografi Islam: Telaah Atas Kitab Futūḥ Al-Buldān," lampung. nu. or. Id, 2025, <https://lampung.nu.or.id/pernik/dinamika-politik-dan-militer-dalam-historiografi-islam-telaah-atas-kitab-fut-al-buld-n-byVHH>.

⁸ Hoyland, *Seeing Islam As Others Saw It*.

⁹ Deden Zaenal Muttaqin, "Studi Awal Historiografi Islam Abad Pertengahan," *Buletin Al-Turas* 15 (2009).

memberikan gambaran yang luas terkait kajian tersebut terhadap kajian kitab Futuh al-Buldan.

Berdasarkan tinjauan tersebut, di temukan kesenjangan riset, karena belum ada kajian yang secara spesifik dan mendalam membahas dinamika politik dan militer telaah kitab Futuh al-Buldan, pada kurun waktu 850-870 M secara utuh.

Kajian ini akan berfokus pada Dinamika Politik dan Militer pada kajian kitab Futuh al-Buldan yang berasal pada abad ke-9. Menganalisis terhadap kajian kitab tersebut, sekaligus menyumbangkan perspektif baru dalam sejarah penulisan Islam awal. Mengkaji sejarah Islam awal itu sangat penting menurut Hodgson, dalam bukunya *The Venture of Islam* (1974), menjelaskan bahwa awal Islam itu penting dipahami karena dari situlah lahir sesuatu yang ia sebut “peradaban Islam”. Pengaruh Islam tidak berhenti pada ajaran agamanya saja, tapi berkembang menjadi satu kebudayaan besar yang mencakup banyak hal, mulai dari sistem hukum, seni, sampai cara berfikir tentang politik.¹⁰

Berangkat dari kesenjangan tersebut, peneliti ini memiliki tujuan utama: menganalisis dan menjawab tiga pertanyaan, pertama, Siapa Ahmad ibn Yahya al-Baladhuri? Kedua, Bagaimana latar sosial dan politik Dinasti Abbasiyah pada abad ke-9 M? Dan ketiga, Bagaimana Dinamika politik dan militer dalam Narasi Futuh al-Buldan?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian sejarah. Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam metode penelitian sejarah. Pertama penulis memperoleh sumber sejarah melalui satu cara yang paling relevan dan dapat terjangkau dari keterbatasan penulis, yaitu penelitian terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku-buku, laporan, serta penelitian terdahulu yang masih terkait dengan penelitian ini. Sumber pustaka berupa buku-buku didapati dari toko buku, secara online seperti buku Suntingan dari Undang-Undang Simbur cahaya dan secara online terdapat dari artikel-artikel seperti dari karangan Mutaqin yang berjudul Studi awal historiografi Islam abad pertengahan, kemudian karya Kennedy, yang berjudul *The Prophet and the Age of the Caliphates*.¹¹

Selanjutnya penulis mencari sumber keaslian dan kesamaan mengenai pembahasan terkait, dengan ini penulis membandingkan atau membedakan mana sumber yang asli dengan yang tidak relevan dengan pembahasan terkait.

¹⁰ Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization* (Chicago: University of Chicago Press, 1974).

¹¹ Abd Rahman Hamid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 2011.

Setelah penulis mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan, alangkah baiknya penulis melakukan kritik terhadap sumber yang didapat untuk mengetahui outentifitas dan kredibilitas sumber yang telah penulis dapat. Dalam kritik sumber ini penulis membagi menjadi dua, kritik internal dan kritik eksternal.¹² Dalam kritik internal yang mencakup isi dari kitab suntingan Futub al-Buldan, bahasa yang di gunakan dalam undang-undang tersebut dan ide-ide yang terkandung didalamnya. Dalam ktitik eksternal, yang mencakup fisik dari buku undang-undang tersebut, seperti keutuhan buku, bahan pembuatan buku, usia, dan identifikasi tulisan, serta keaslian nya. Dalam hal ini, penulis membandingkan sumber-sumber yang telat penulis temukan dan memasukan kedalam tulisan ini apa-apa yang menurut penulis sumber yang valid dan kredibel.¹³

Langkah selanjutnya penafsiran akan makna dari suatu fakta sejarah dan menghubungkan fakta-fakta tersebut secara kronologis dengan menganalisis dan mencoba untuk menemukan data dari sumber yang ditemukan. Sumber yang telah penulis kumpulkan harus diseleksi yang kemudian akan disatukan dan di narasikan untuk menciptakan suatu fakta sejarah baru.¹⁴ Tahap terakhir dalam penulisan ini adalah penulisan sejarah yang berarti penulis mencoba merangkai fakta-fakta yang telah di temukan dan fakta baru yang penulis temukan dalam suatu tulisan yang tersusun. Tidak hanya menampilkan fakta dan data saja, melainkan harus memiliki kajian sebab akibat (Tausalitas), maka tulisan ini mencoba untuk menggali lebih dalam Kausalitas dari Kitab Futuh al-Buldan pada masa kekhalifahan Abbasiyah abad ke-9.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Ahmad Ibn Yahya al-Baladhuri

Ahmad ibn Yahya ibn Jabir ibn Dawud Al-Baghdadi al-Baladhuri adalah seorang sejarawan Muslim terkemuka pada abad ke-9 M, dipanggil dengan Abul Abbas atau Abul Hasan. Konon juga kerap dipanggil dengan Abu Bakar dan Abu Ja'far. Dia seorang imam, ahli nasab, seorang petualang, perawi terpercaya, ahli hadist, sastrawan multi talenta, penyair ulung, dan penerjemah.¹⁵

Ia hidup pada masa kejayaan kekhalifahan Abbasiyah. Ia dikenal melalui dua karya monumentalnya, yaitu Futuh al-Buldan dan Ansab al-Ashraf,¹⁶ yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan historiografi Islam awal.

¹² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tirta Wacana, 2018).

¹³ Louis Gottschalk, *Memahami Sejarah* (Jakarta Universitas Indonesia, 1985).

¹⁴ Wahyu iryana, *Historiografi Islam*, 2021.

¹⁵ Aiman Muhammad Arafah, *Futuhul Buldan*, 2015.

¹⁶ Francis Murgotten Philip Hitti, "Al-Baladhuri. The Origins of the Islamic State.," 2007, <https://archive.org/details/originsofislamic02albauoft>.

Kedua karya nya tidak hanya mencerminkan kemampuan naratif sejarah, tetapi juga menampilkan pendekatan dokumentatif yang unik untuk zamannya. Al-Baladhuri lahir sekitar tahun 820 M.

Mengenai reputasi keilmuannya, sejarawan Muslim klasik Al-Mas'udi bahkan menilai Futuh al-Buldan sebagai salah satu sumber terbaik mengenai penaklukan-penaklukan Muslim.¹⁷ Sementara itu, dari sisi metodologi, penelitian orientalis S. D. Goitein menunjukkan bahwa dalam karya keduanya, Ansab al-Ashraf, Al-Baladhuri menerapkan tata urutan genealogis yang khas dalam historiografi Arab, dengan menggabungkan sumber-sumber annalistik dan biografis seperti yang digunakan oleh al-Waqidi dan Ibnu Sa'd. Goitein juga mencatat bahwa penerapan metode hadis oleh Al-Baladhuri memungkinkannya menyertakan berbagai versi riwayat suatu peristiwa, sehingga menghasilkan narasi sejarah yang lebih kaya dibandingkan pendahulunya seperti At-Tabari.¹⁸

Meskipun latar belakang etnisnya tidak diketahui secara pasti, beberapa sumber menyatakan ia berdarah persia namun ia menunjukkan afliasi kultural yang kuat terhadap arab. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Baghdad, ibu kota Abbasiyah dan pusat peradaban Islam kala itu. Di lingkungan istana, khususnya pada masa khalifah al-Mutawakkil dan al-Musta'in, al-Baladhuri memiliki kedudukan yang penting. Ia bahkan disebut-sebut sebagai guru dari putra khalifah al-Mu'tazz yang menunjukkan kedekatannya dengan lingkungan elite kekuasaan.¹⁹

Karya utamanya, Futuh al-Buldan, adalah catatan sejarah penaklukan wilayah oleh kaum Muslimin sejak masa Nabi Muhammad hingga masa awal Abbasiyah. Dalam karya ini, al-Baladhuri tidak hanya mencatat peristiwa militer, tetapi juga mendokumentasikan perjanjian damai, sistem pajak, serta struktur administrasi yang diterapkan pasca-penaklukan. Hal ini menunjukkan bahwa al-Baladhuri memiliki perhatian besar terhadap aspek politik dan administrasi dari ekspansi Islam, bukan sekedar glorifikasi kemenangan militer. Karya lainnya, Ansab al-Ashraf, merupakan koleksi genealogis dan biografi yang isinya riwayat hidup para tokoh penting dalam Islam, mulai dari Nabi Muhammad, para sahabat, hingga tokoh-tokoh dari dinasti Umayyah dan Abbasiyah.²⁰ Al-Baladhuri dikenal karena pendekatannya yang kritis dan faktual. Ia dianggap sebagai pelopor dalam penggunaan dokumen administratif sebagai sumber sejarah. Gaya penulisannya cenderung menghindari hiperbola dan glorifikasi berlebihan, suatu karakteristik yang

¹⁷ Abu Athir, "A Brief Biography of Al-Baladhuri," in *Islamic History*, 2021.

¹⁸ S. D. Goitein, *The Place of Baladhuri's Ansab Al-Ashraf in Arabic Historiography*, Dalam *Atti Del XIX Congresso Internazionale Degli Orientalist* (Roma: Senato, 1938).

¹⁹ Philip Hitti, "Al-Baladhuri. The Origins of the Islamic State."

²⁰ Farasat Latif, "A Brief Biography of Al-Baladhuri," *IslamicHistory.info*, 2021, <https://islamichistory.info/2021/11/03/brief-biography-of-al-baladhuri/>.

membedakannya dari sebagian sejarawan sezamannya. Menurut beberapa sumber, ia meninggal sekitar tahun 892 M di Baghdad.

Latar Sosial dan Politik Dinasti Abbasiyah Abad ke-9

Abad ke-9 M adalah salah satu periode paling signifikan dalam sejarah Dinasti Abbasiyah. Masa ini ditandai oleh kontradiksi yang menarik, satu sisi merupakan puncak perkembangan intelektual dan budaya dalam sejarah Islam klasik, sementara di sisi lain menyimpan gejolak sosial-politik yang serius. Perubahan besar dalam struktur pemerintahan, dinamika sosial yang kompleks, serta munculnya kekuatan militer dan sektarian turut mewarnai wajah dunia Islam pada abad tersebut. Masyarakat Abbasiyah pada abad ke-9 sangat majemuk, baik dari segi etnis maupun status sosial, struktur sosialnya terbagi menjadi beberapa lapisan sosial, yaitu kalangan aristokrat Abbasiyah, ulama, pedagang, pekerja kota, petani, dan budak. Khalifah dan keluarganya menempati posisi puncak piramida sosial, disusul oleh pejabat negara, terutama dari kalangan Persia dan Arab.

Ulama memainkan peran penting dalam sistem sosial-politik, karena mereka menjadi otoritas dalam bidang hukum dan keagamaan.²¹ Di kota-kota besar seperti Baghdad, masyarakat hidup dalam iklim sosial yang kosmopolitan. Komunitas Arab, Persia, yahudi, kristen, dan bahkan hindu hidup berdampingan dalam interaksi yang kompleks. Perdagangan dan aktivitas keilmuan membuat kota ini menjadi pusat intelektual dunia Islam. Peran pedagang juga signifikan dalam mobilitas sosial, karena perdagangan kawasan lintas menghasilkan kekayaan yang memungkinkan pengaruh politik.²²

Salah satu ciri utama abad ke-9 adalah kemunculan zaman keemasan Islam (Islamic Golden Age). Periode ini menyaksikan lahirnya institusi seperti Bayt al-Hikmah (House of Wisdom) di Baghdad yang menjadi pusat penerjemah karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Di sinilah tokoh-tokoh seperti al-Kindi, al-farabi, dan Hunayn ibn Ishaq menerjemahkan karya Aristoteles dan Galen ke dalam Khazanah keilmuan Islam.²³ Jika dari segi politik, abad ke-9 merupakan masa peralihan dari sentralisasi kekuasaan ke arah desentralisasi.

Meskipun khalifah masih diakui sebagai pemimpin spiritual dan simbol otoritas tertinggi, namun kenyataannya kekuasaan eksekutif banyak dijalankan oleh pejabat militer dan gubernur daerah. Munculnya dinasti-dinasti semi-independen seperti Tuluniyah di Mesir dan Saffariyah di Persia menandakan

²¹ Ira. Lapidus M, "A History of Islamic Societies," *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 14, no. 1 (1971): 106, <https://doi.org/10.2307/3596012>.

²² Ronald Lukens-bull, *Handbook of Contemporary Islam and Muslim Lives, Handbook of Contemporary Islam and Muslim Lives*, 2020, <https://doi.org/10.1007/978-3-319-73653-2>.

²³ Dimitri Gutas, "Greek Thought Arabic Culture," *Faith and Philosophy*, 2021, 9-32, https://doi.org/10.1163/9789004465640_003.

bahwa pusat kekuasaan Abbasiyah tidak lagi mutlak.²⁴ Salah satu faktor penting adalah meningkatnya pengaruh pasukan militer non-Arab, terutama budak militer Turki (mamluk). Mereka awalnya direkrut sebagai pengawal khalifah, namun kemudian menjadi kekuatan dominan dalam menentukan siapa yang naik atau turun dari tahta. Hal ini, berujung pada masa instabilitas yang disebut sebagai "anarki militer" (861-870), dimana khalifah dapat di bunuh atau di turunkan oleh para perwira Turki.²⁵

Selain ketegangan internal antara kekuasaan sipil dan militer, dinasti Abbasiyah juga menghadapi berbagai pemberontakan. Salah satunya yang terbesar adalah pemberontakan Zanj (869-883 M), yaitu pemberontakan budak Afrika di wilayah Irak bagian selatan. Gerakan ini bukan hanya soal pembebasan budak, tetapi juga mencerminkan ketegangan sosial-ekonomi di wilayah pertanian yang strategis.²⁶ Pemberontakan Zanj merupakan salah satu peristiwa paling berdarah dalam sejarah kekhalifahan Abbasiyah, berlangsung dari tahun 869 hingga 883 masehi di wilayah Irak selatan, khususnya di sekitar Basra.

Pemberontakan ini dipimpin oleh Ali bin Muhammad dan melibatkan ribuan budak Zanj yang berasal dari pesisir Afrika Timur, serta sejumlah orang merdeka dari berbagai latar belakang etnis. Konflik ini tidak hanya menandai puncak krisis sosial-ekonomi di wilayah tersebut, tetapi juga memperlihatkan kerentanan struktur kekuasaan Abbasiyah terhadap gejolak sosial yang dipicu oleh sistem perbudakan yang manusiawi.²⁷

Budak Zanj adalah kelompok budak berbahasa Bantu yang di angkut dari Afrika Timur ke Irak untuk bekerja di rawa-rawa garam dan lahan pertanian yang tidak subur. Kondisi kehidupan yang memprihatin ini diperparah oleh situasi politik kekhalifahan Abbasiyah yang tengah dilanda krisis internal. Ali bin Muhammad yang bukan dari kalangan budak memanfaatkan situasi ini untuk menggagalkan kekuatan. Ia berjanji kepada budak kebebasan, kekayaan, dan perlakuan adil. Dengan retorika yang kuat dan strategi cermat, Ali berhasil merekrut ribuan budak dan orang merdeka untuk bergabung dalam pergerakan perlawanan terhadap tuan-tuan tanah dan otoritas Abbasiyah.²⁸

²⁴ Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam, Volume 1: The Classical Age of Islam*, 1977.

²⁵ Crone Patricia, *Slaves on Horses The Evolution Of The Islamic Polity*.

²⁶ David Waines, *The History of Al-Tabari - Vol. 36 - The Revolt of the Zanj*, 1992.

²⁷ Adam Ali, "Zanj Revolt in the Abbasid Caliphate (Iraq)," *AFRICAN HISTORY*, 2022.

²⁸ Rifai Fathoni Shodiq, "Pemberontakan Budak Pada Masa Daulah Abbasiyah (869- 883 M)," *Wawasansejarah.com*, 2021, <https://wawasansejarah.com/pemberontakan-zanj-budak/>.



Illustrasi pasar budak pada Gambar *Maqāmah* ke-34 berlatar pasar budak di Zabid, Yaman, dan kini tersimpan dalam manuskrip Arabe 5847, folio 105r di Bibliothèque nationale de France.

Pemberontakan ini juga menimbulkan kepanikan dikalangan elite Abbasiyah. Upaya-upaya diplomasi dan penyuapan gagal meredam perlawanan. Zanj menolak tawaran damai dan terus memperluas pengaruhnya, bahkan sempat menyabotase jalur suplai ke Baghdad dan merampas Kisra (kain penutup Ka'bah) yang sedang dikirim ke Mekkah. Setelah lebih dari satu dekade, pemerintah Abbasiyah akhirnya mengerahkan kekuatan militer besar-besaran dibawah pimpinan Al-Muwaffaq, saudara khalifah al-Mu'tamid. Pasukan Abbasiyah mengepung ibu kota pemberontak, al-Mukhtara, selama dua tahun. Pada tahun 883, ibu kota pemberontak berhasil direbut, Ali bin Muhammad terbunuh, dan sisa-sisa pasukan Zanj dieksekusi atau dikembalikan ke perbudakan.

Konflik sektarian juga marak, termasuk ketegangan antara sunni dan kelompok syiah yang menentang legitimasi Abbasiyah. Kelompok-kelompok seperti Qaramitah dan Alaqiyah mulai memperkuat basis massa mereka, bahkan menciptakan sistem pemerintahan paralel di luar kendali khalifah. Meskipun mencapai puncak kejayaan, Dinasti Abbasiyah menghadapi berbagai tantangan dan konflik internal. Perselisihan diantara anggota keluarga kerajaan, seperti konflik antara Al-Amin dan Al-Ma'mun, melemahkan stabilitas politik dinasti, selain itu, ketergantungan pada pasukan bayaran asing, seperti tentara Turki dan Persia, menyebabkan munculnya kekuatan militer yang mendominasi politik dinasti.

Disintegrasi Abbasiyah menjadi sejumlah dinasti provinsi yang independen menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam struktur pemerintahan dan masyarakat. Munculnya elite militer bekas budak dan sistem pengaturan konsesi lahan memperjelas bahwa terjadi pergeseran kekuasaan dari elite lama ke elite baru.

Dinamika Politik dan Militer dalam Narasi Futuh al-Buldan

Karya monumental Futuh al-Baladhuri yang ditulis oleh Ahmad ibn Yahya al-Baladhuri, adalah salah satu teks paling penting dalam historiografi Islam awal. Dalam kitab ini, al-Baladhuri mencatat penaklukan berbagai wilayah oleh kaum Muslim sejak masa Nabi Muhammad hingga periode awal Abbasiyah. Kitab ini menyajikan narasi sejarah yang tidak hanya berfokus pada peperangan semata, tetapi juga strategi politik, perjanjian, dan administrasi yang dilakukan oleh kekhalifahan Islam dalam memperluas wilayahnya.

Al-Baladhuri menulis Futuh al-Buldan pada abad ke-9, masa ketika kekhalifahan Abbasiyah mengalami tekanan politik dan sosial akibat tantangan administratif dalam mengelola wilayah yang luas dan multietnis. Menurut Ryan Lynch, karya ini berfungsi sebagai sumber hukum dan politik, membantu penguasa dan pejabat memahami bagaimana pendahulu mereka mengintegrasikan wilayah baru ke dalam struktur kekuasaan Islam melalui diplomasi, perjanjian, dan penaklukan bersenjata. Melalui pendekatan kronologis dan geografis, al-Baladhuri menyusun narasinya berdasarkan wilayah yang ditaklukan, seperti Irak, Persia, Syam, Mesir, Afrika selatan, dan wilayah Asia Tengah. Ia menekankan pentingnya dokumentasi perjanjian damai, pembagian tanah, serta pemberlakuan pajak kepada penduduk non-Muslim sebagai aspek penting dalam stabilitas pemerintahan.²⁹

Misalnya, penaklukan Damaskus dan Hims di capai melalui kombinasi tekanan militer dan perjanjian damai yang menjamin perlindungan bagi penduduk Kristen, harta benda mereka, serta kebebasan beragama. Sebagai gantinya, mereka diminta membayar Jizyah (pajak non-Muslim) dan tunduk pada otoritas Islam.³⁰ Salah satu keunikan dalam kitab Futuh al-Buldan adalah penekanan pada proses damai dalam penaklukan. Dalam banyak kasus, kota-kota memilih menyerah secara sukarela dan membuat perjanjian damai daripada menghadapi pertempuran yang merugikan. Ini menunjukkan bahwa ekspansi Islam pada masa awal sangat pragmatis, dengan mempertimbangkan stabilitas jangka panjang.

²⁹ Ryan J. Lynch, *Arab Conquests and Early Islamic Historiography: The Futuh Al-Buldan of Al-Baladhuri*.

³⁰ Philip Hitti, "Al-Baladhuri. The Origins of the Islamic State."

Perjanjian ini kemudian menjadi dasar hukum dan administratif untuk integrasi wilayah tersebut ke dalam sistem pemerintahan Islam. Al-Baladhuri sering mencatat isi perjanjian ini, termasuk jumlah pajak, kewajiban perlindungan, serta larangan pemaksaan agama.³¹ Namun, pendekatan damai dan administratif yang terstruktur ini mengalami tantangan serius selama periode Anarki di Samarra (861-870). Pada masa ini, kekhalifahan Abbasiyah menghadapi ketidakstabilan politik yang parah, ditandai dengan dominasi militer oleh pasukan Turki yang sering kali menggulingkan dan mengangkat Khalifah sesuai kepentingan mereka. Empat khalifah berturut-turut menjadi boneka di tangan faksi militer yang berdaing, merusak otoritas pemerintahan pusat dan mengganggu stabilitas administratif yang sebelumnya dijaga melalui perjanjian damai.

Empat khalifah berturut-turut menjadi boneka di tangan faksi militer yang berdaing, merusak otoritas pemerintahan pusat dan mengganggu stabilitas administratif yang sebelumnya dijaga melalui perjanjian damai.³² Menurut Matthew S. Gordon dalam *The Breaking of a Thousand Swords: A History of the Turkish Military of Samarra*, yang menyebut periode ini sebagai fase ketika pengawal Turki di Samarra berkembang menjadi kekuatan sosial-politik tersendiri, bahkan sampai memiliki jaringan patronase yang luas hingga ke provinsi-provinsi seperti Mesir, sehingga kendali fiskal dan administratif kekhalifahan pusat atas wilayah-wilayah taklukan menjadi semakin terganggu.³³ Hugh Kennedy, dalam ulasannya atas karya Gordon tersebut, turut menegaskan bahwa periode dominasi militer Turki atas Kekhalifahan Abbasiyah ini kerap dianalogikan dengan masa krisis abad ketiga Kekaisaran Romawi, ketika Garda Praetorian secara sepihak mengangkat dan menjatuhkan kaisar sesuai kepentingan mereka sendiri sebuah analogi yang menggambarkan betapa parahnya keruntuhan otoritas sipil-administratif pada masa itu.

Justru dalam situasi krisis semacam inilah, menurut Ryan Lynch, letak signifikansi penulisan *Futuh al-Buldan* menjadi semakin jelas. Alih-alih dipahami sebagai karya yang tidak berkaitan dengan gejolak politik di sekelilingnya, kitab ini sesungguhnya lahir sebagai respons langsung terhadap kebutuhan mendesak negara Abbasiyah untuk menjaga kesinambungan administratif di tengah kekacauan tersebut.³⁴ Al-Baladhuri sendiri, yang pada periode ini aktif menjabat sebagai sekretaris (katib) istana pada masa Al-Mutawakkil, Al-Musta'in, hingga Al-Mu'tazz, berada di posisi yang

³¹ Jorgen Simonsen, "Jorgen Simonsen," 1957.

³² Hugh Kennedy, *The Prophet and the Age of the Caliphates*, University of New York Press, 2004.

³³ Matthew S Gordon and F Kent, "The Breaking of a Thousand Swords: A History of the Turkish Military of Samarra," 2001.

³⁴ Ryan J. Lynch, "Between the Conquests and the Court: A Critical Analysis of the Kitāb Futūḥ Al-Buldān of Al-Balādhurī," *University of OXFORD*, 2016.

memungkinkannya menyaksikan langsung bagaimana otoritas fiskal dan administratif pusat mulai kehilangan cengkeramannya atas wilayah-wilayah taklukan.³⁵ Dalam konteks inilah, dokumentasi rinci mengenai perjanjian damai, batas wilayah, serta ketentuan pajak yang disusun Al-Baladhuri berfungsi sebagai upaya menegaskan kembali dasar hukum dan fiskal kekuasaan Abbasiyah, pada saat legitimasi politik di pusat kekhalifahan sedang berada pada titik paling rapuh sepanjang sejarah dinasti tersebut.

Anarki di Samarra (861-870)

Periode Anarki di Samarra adalah salah satu periode dramatis dalam sejarah kekhalifahan Abbasiyah, yang memperlihatkan bagaimana ketergantungan pada kekuatan militer dapat merusak struktur pemerintahan pusat. Krisis ini tidak hanya mencerminkan persaingan elit militer dan politik, tetapi juga memperlihatkan pergeseran kekuasaan dari tangan khalifah ke pasukan elit, khususnya tentara budak Turki (mamluk). Situasi ini menandai awal dari penurunan otoritas khalifah sebagai pemimpin spiritual dan administratif umat Islam. Krisis di mulai dengan terbunuhnya khalifah al-Mutawakkil pada tahun 861 oleh pengawal Turki-nya sendiri. Tindakan ini merupakan puncak dari ketegangan antara khalifah dan kelompok militer yang selama ini menjadi penopang kekuasaan, namun juga menjadi ancaman utama terhadap stabilitas kekhalifahan. Al-Mutawakkil dikenal karena usahanya untuk mengurangi pengaruh militer Turki, termasuk menyingkirkan pejabat yang berpihak pada mereka, sehingga menimbulkan reaksi keras yang berujung pada pembunuhan dirinya.³⁶

Setelah al-Mutawakkil terbunuh, suksesi kekhalifahan menjadi tidak menentu. Al-Mustanis, putra dari al-Mutawakkil, naik tahta namun hanya berkuasa selama enam bulan sebelum wafat, diduga karena diracuni oleh faksi militer yang tidak menyukai kedekatannya dengan kaum Syi'ah dan keinginannya mengangkat saudaranya sebagai pengganti. Al-Musta'in, khalifah berikutnya, juga tidak mampu mengendalikan kekuatan militer. Ketika ia mencoba melarikan diri ke Baghdad, kelompok militer lainnya mengangkat al-Mu'tazz sebagai khalifah dan mengepung Baghdad hingga al-Musta'in menyerah dan kemudian dieksekusi. Kejadian ini memperjelas bahwa militer telah menjadi pihak yang menentukan dalam proses suksesi kekhalifahan.³⁷

Kepemimpinan al-Mu'tazz pun tidak berlangsung damai. Ia berupaya memulihkan otoritas kekhalifahan dengan membatasi peran militer, namun

³⁵ Ryan J. Lynch, *Arab Conquests and Early Islamic Historiography: The Futuh Al-Buldan of Al-Baladhuri*.

³⁶ Nur Mayasari, "Peran Militer Budak Pada Masa Pemerintahan Khalifah AL-Mu'tashim (833-842 M)" (2016).

³⁷ N Adamo and N Al-Ansari, "Sammara and Its Canals," *Journal of Earth Sciences and Geotechnical ...*, no. January (2020).

gagal karena tekanan keuangan dan perlawanan internal. Ia akhirnya di gulingkan dan di bunuh oleh militer. Hal ini yang sama terjadi pada pengagantinya, al-Muhtadi, yang berusaha menegakkan keadilan dan mengembalikan supremasi hukum, namun tidak berhasil karena kekuatan militer terlalu dominan. Ia pun dibunuh pada tahun 870, menandai akhir dari satu dekade penuh kekacauan dan kekerasan yang disebut “Anarki di Samarra”.

Dampak dari anarki ini sangat luas dan menghancurkan. Pertama, otoritas pusat kekhalifahan kehilangan legitimasi politik dimata masyarakat dan wilayah kekuasaan yang lebih luas. Kedua, munculnya kecenderungan desentralisasi, dimana para gubernur provinsi dan pemimpin lokal mulai bertindak lebih mandiri. Salah satu contoh nyata adalah munculnya Ahmad bin Thulun di Mesir. Ia merupakan seorang perwira militer Turki yang menguasai wilayah tersebut dan menjalankan pemerintahan secara de facto otonom dari Baghdad. Ia menerapkan kebijakan publik yang kuat dan efisien, termasuk dalam pengelolaan pajak dan stabilisasi ekonomi, sebagai respons terhadap kekacauan yang terjadi di pusat kekhalifahan.³⁸

Ketiga, dari sisi sosial dan ekonomi, kekacauan politik menyebabkan penurunan aktivitas perdagangan dan pertanian, serta meningkatnya beban fiskal terhadap rakyat. Hal ini diperparah oleh ketidakstabilan hukum dan meningkatnya korupsi. Ketidakmampuan khalifah untuk menjamin keamanan dan stabilitas menjadai perjanjian-perjanjian damai dan sistem pajak seperti jizyah yang sebelumnya dijalankam dengan baik selama ekspansi Islam awal, seperti dicatat dalam kitab Futuh al-Buldan menjadi terabaikan. Penduduk non-Muslim yang sebelumnya dilindungi hak-haknya sesuai perjanjian, kini berada dalam ketidakpastian hukum dan sosial.³⁹

Puncak dari masa anarki ini adalah ketika al-Mu'tamid naik tahta dan menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada saudaranya, al-Muwaffaq, yang berhasil memulihkan sebagian kestabilan dengan membentuk kekuasaan militer yang terorganisir. Dengan demikian, masa setelah Anarki di Samarra tidak pernah mengembalikan otoritas pusat Abbasiyah ke masa kejayaannya. Kekeuasaan khalifah tetap lemah dan lebih banyak bersifat simbolis, sementara kekuasaan riil berada di tangan para jenderal militer dan gubernur daerah.⁴⁰

Setelah berakhirnya masa Anarki di Samarra pada tahun 870 M, dinasti Abbasiyah tidak pernah sepenuhnya pulih dari kerusakan yang di timbulkan oleh

³⁸ Rafiq Aji Prayogo, “Kebijakan Publik Ahmad Bin Thulun Dan Pengaruhnya Terhadap Dinasti Thulunyah Di Mesir (872-884 M)” (2022).

³⁹ Ryan J. Lynch, *Arab Conquests and Early Islamic Historiography: The Futuh Al-Buldan of Al-Baladhuri*.

⁴⁰ Rakhmanova Odinakhon Ravhsanbekovna, “ ‘ The Golden Age of Islam ’ - The History of The Caliphate,” *Pubmedia Social and Sciences and Humanities*, no. 2 (2024): 1-12.

dominasi militer dan lemahnya otoritas pusat. Al-Muwaffaq, seorang pemimpin militer yang cakap dan memiliki loyalitas dari kekuatan militer utama, segera mengambil peran sebagai pemimpin *de facto* kekhalifahan. Ia memusatkan kendali atas angkatan bersenjata dan memperbaiki relasi dengan para jenderal Turki. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah menumpas pemberontakan Zanj (869-883 M), sebuah revolusi budak bersenjata yang mengancam eksistensi Abbasiyah di wilayah selatan Irak.⁴¹ Keberhasilannya memadamkan pemberontakan ini mengangkat reputasinya dan mengekahkan kendali militer atas pemerintahan.

Meski kekhalifahan tampak stabil, kestabilan itu dibangun di atas fondasi militer, bukan institusi kekuasaan sipil atau religius. Kekuasaan kekhalifahan berubah menjadi simbolis, hanya melambangkan legitimasi keagamaan dan konstiusitas histori. Sementara itu, kekuasaan nyata berada di tangan al-Muwaffaq dan kemudian dilanjutkan oleh putranya, al-Mu'tadid. Para gubernur wilayah juga mulai bertindak lebih otonom, mengembangkan struktur administratif dan militer mereka sendiri yang kadang-kadang sepenuhnya lepas dari otoritas pusat.⁴² Dalam dokumen yang dikenal sebagai perjanjian pembagian wilayah (875M), al-Mu'tamid membagi kekuasaan antara al-Muwaffaq dan putranya al-Muwaffaq diberi wewenang atas wilayah timur kekhalifahan, termasuk Irak dan Persia, sedangkan al-Mufawwid secara nominal menguasai wilayah barat. Namun dalam praktiknya, hanya al-Muwaffaq yang menjalankan pemerintahan secara aktif, sedangkan khalifah sendiri hidup dalam kemewahan istana tanpa kekuasaan sejati.

Pola ini menandai kemunduran kekhalifahan sebagai institusi politik sentral dalam dunia Islam. Dalam dekade-dekade berikutnya, dinasti Abbasiyah menyaksikan kebangkitan dinasti semi-independen seperti Tuluniyah di Mesir, Saffarid di Iran, dan kemudian Buyid serta Seljuk, yang semakin memperjelas pelemahan kekuasaan pusat. Otoritas religius khalifah tetap diakui, tetapi kendali administratif dan militer berada di tangan penguasa lokal atau panglima militer yang memegang kekuasaan sejati di wilayah masing-masing.⁴³

Keterkaitan antara Anarki Samarra dengan Futuh al-Buldan terletak pada konteks dan motif penulisannya, bukan pada isi tematiknya. Berdasarkan penelitian filologis-historiografis Ryan J. Lynch dalam disertasi Oxford-nya, *Between the Conquests and the Court: A Critical Analysis of the Kitāb Futūḥ al-Buldān of al-Balādhurī*, naskah ini kemungkinan besar diselesaikan tepat pada akhir masa Anarki Samarra, yakni akhir dekade 860-an M periode ketika otoritas pusat Kekhalifahan Abbasiyah nyaris lumpuh akibat pembunuhan

⁴¹ Kennedy, *The Prophet and the Age of the Caliphates*.

⁴² Gordon and Kent, "The Breaking of a Thousand Swords: A History of the Turkish Military of Samarra."

⁴³ Safari Daud, *Historiografi Islam Kritis* (Yogyakarta: Ombak, 2023).

Khalifah Al-Mutawakkil serta pergantian khalifah yang berturut-turut dan penuh kekerasan.⁴⁴ Lynch berargumen bahwa meskipun negara sedang dilanda kekacauan politik, institusi-institusi pemerintahan tetap harus dipertahankan keberlangsungannya, dan justru dalam situasi luar biasa inilah yang bertepatan dengan masa puncak kehidupan dan kariernya di istana Al-Baladhuri mulai menyusun *Futuh al-Buldan*.⁴⁵

Tesis sentral Lynch menegaskan bahwa kitab ini pada dasarnya berfungsi sebagai semacam buku pegangan administratif bagi para pejabat istana Abbasiyah yang tengah berjuang menyeimbangkan anggaran negara, memungut pajak dari provinsi-provinsi yang kendalinya mulai melemah, serta menjaga agar sistem administrasi imperial tetap berjalan di tengah masa yang secara politik sangat rapuh.⁴⁶ Dengan demikian, penekanan khas Al-Baladhuri pada dokumen-dokumen perjanjian damai (*sulh*), status hukum tanah taklukan, dan pengaturan pajak provinsi dapat dipahami bukan sekadar minat antikuarian, melainkan respons fungsional terhadap kebutuhan mendesak negara Abbasiyah untuk menegaskan kembali dasar legitimasi fiskal dan administratifnya atas wilayah-wilayah taklukan, tepat di saat otoritas pusat sedang berada pada titik paling lemah dalam sejarah dinasti tersebut. Dengan demikian, Anarki Samarra tidak sekadar menjadi latar belakang temporal penulisan kitab ini, melainkan turut membentuk urgensi dan orientasi praktis dari keseluruhan proyek historiografis Al-Baladhuri yaitu menyediakan rujukan administratif yang dapat diandalkan oleh para pejabat Abbasiyah di tengah pemerintahan pusat yang sedang goyah.



Muqaddimah Kitab suntingan *Futuh al-Buldan* yang diedit oleh M. J. DE GOEJE pada tahun 1866

⁴⁴ Ryan J. Lynch, "Between the Conquests and the Court: A Critical Analysis of the Kitāb Futūḥ Al-Buldān of Al-Balādhurī."

⁴⁵ Sean W Anthony, *Review: Arab Conquests and Early Islamic Historiography* (Studies in Late Antiquity, University of California Press, 2022).

⁴⁶ Ryan J. Lynch, *Arab Conquests and Early Islamic Historiography: The Futuh Al-Buldan of Al-Baladhuri*. Hlm 179-182.

KESIMPULAN

Dinamika politik dan militer dalam Kitab Futuh al-Buldan karya Al-Baladhuri saling terjalin erat: dinamika politik menunjukkan pola narasi yang senantiasa mengarahkan kisah penaklukan menuju pertanyaan administratif-fiskal siapa yang berhak memerintah, bagaimana status hukum tanah, dan berapa besar kewajiban pajak yang harus ditunaikan penduduk taklukan sebuah corak yang mencerminkan fungsi kitab sebagai instrumen legitimasi dan rujukan hukum-administratif bagi Kekhalifahan Abbasiyah, terutama di tengah krisis Anarki Samarra ketika otoritas pusat sedang rapuh akibat dominasi faksi militer Turki; sementara itu, dalam aspek dinamika militer, Al-Baladhuri secara konsisten menempatkan proses penaklukan bukan sebagai tujuan akhir narasi, melainkan sebagai tahap awal yang selalu diikuti pengaturan politik-administratif berikutnya, dengan pembedaan tegas antara penaklukan lewat pertempuran (*'anwatan*) dan penyerahan damai (*sulh*) yang menunjukkan bahwa ekspansi Islam pada masa awal bercorak pragmatis dan mengutamakan stabilitas jangka panjang dibandingkan kemenangan militer semata sehingga dapat disimpulkan bahwa narasi militer dan politik dalam kitab ini bersifat fungsional dan saling menopang, menjadikan Futuh al-Buldan bukan sekadar kronik penaklukan, melainkan dokumen historiografis yang sarat muatan politik-administratif sesuai konteks zamannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yusuf, Perpustakaan Penelitian Tooba, 19 Maret 2014
- Abu Athir, "A Brief Biography of Al-Baladhuri," in *Islamic History*, 2021.
- Aiman Muhammad, (2015). *Futuhul Buldan*. Jakarta Timur. Pustaka Al-Kautsar,
- Adam Ali, Adam, 'Pemberontakan Zanj di Kekhalifahan Abbasiyah (Irak)' (28 Jan. 2022) , dalam Thomas Spear (ed.) , *Oxford Research Encyclopedia of African History* (New York, NY, edisi daring, Oxford Academic) hlm. 16. (diakses pada 2 juni 2026.)
- Baek Simonsen, J. (1983). *Nyere Forskning I Arabisk-Islamisk Historie*. Historisk Tidsskrift, 14
- Cebeci Ali, (2020), *Arabic Conquests and Early Islamic Historiography: The Futuh al-Buldan of al-Baladhuri* (by Ryan Lynch) vol. 39. No. 1-2, hlm 98.
- Crone Patricia, (1980), *Slaves on Horses The Evolution Of The Islamic Polity*. Cambridge University Press
- Chase F. Robinson, (2000). *Islamic Historiography*, Cambridge University Press
- David Waines, (1992). *The Revolt of the Zanj. The History of Al-Tabari - Vol. 36*. State University New York Press
- Dimitri Gutas, (1998), "Greek Thought Arabic Culture," *Faith and Philosophy*, 2021, hlm 9-32,
- Deden Zaenal Muttaqin, "Studi Awal Historiografi Islam Abad Pertengahan," Vol. 15 No. 1 hlm. 25 *Buletin AlTuras* (2009). (diakses pada 15 maret 2026)
- Fair team "The Zanj Rebellion: History, Cause and Significance," *Foreign Affairs Insight and riew*, 2023, <https://fairbd.net/zanj-rebellion-history-cause-significance/?utm> (diakses pada februari 2026)

- Francis Murgotten Philip Hitti. Internet Archive. Al-Baladhuri. The Orogen of the Islamic State. 10 Oktober 2007
- Gordon, Matthew S and F Kent, (2004). The Breaking of a Thousand Swords: A History of the Turkish Military of Samarra. State University of New York Press
- Hugh Kennedy, (2004). The Prophet and the Age of the Caliphates, The Prophet and the Age of the Caliphates, Harlow, Inggris; New York: Pearson/Longman
- Hugh Kennedy, History of the Arab Invasions: The Conquest of the Lands, 2022.
- Ira. Lapidus M, (1971) "A History of Islamic Societies," Journal of the Economic and Social History of the Orient 14, no. 1 hlm 106.
- Kuntowijoyo, (2001). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta:Yayasan Bentang Budaya
- Rafiq Aji Prayogo, "Kebijakan Publik Ahmad Bin Thulun Dan Pengaruhnya Terhadap Dinasti Thulunyah Di Mesir (872-884 M)" hlm. 114 (2022)
- Robert G Hoyland, (1997), Seeing Islam As Others Saw It (The Darwin Press, Inc.
- Ronald Lukens-bull, (2021), Handbook of Contemporary and Muslim lives, Nur Mayasari, (2016) "Peran Militer Budak Pada Masa Pemerintahan Khalifah AL-Mu'tashim (833-842 M)" *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- N Adamo and N Al-Ansari, "Sammara and Its Canals," Journal of Earth Sciences and Geotechnical no.3, vol. 10, hlm. 223-251 January (2020). (diakses pada Mei 2026)
- Rakhmanova Odinakhon Ravhsanbekovna, "' The Golden Age of Islam ' - The History of The Caliphate," Pubmedia Social and Sciences and Humanities, vol 2 no. 2, hlm 6 (2024). (diakses pada 2 juni 2026)
- Safari Daud, Historiografi Islam Kritis (Yogyakarta: Ombak, 2023)
- Syahrudin, (2014) "Disintegrasi Politik Pada Masa Dinasti Bani Abbas," *Procedia Manufacturing*. UIN Alauddin Makassar
- Sean W Anthony, Review: Arab Conquests and Early Islamic Historiography (Studies in Late Antiquity, University of California Press, 2022) (diakses pada 2 agustus 2026)
- Wahyu Iryana, Dinamika Politik dan Militer dalam Historiografi Islam telaah atas Kitab Futuh al-Buldan. <https://lampung.nu.or.id/pernik/dinamika-politik-dan-militer-dalam-historiografi-islam-telaah-atas-kitab-fut-al-buld-n-byVHH?utm> (diakses pada November 2026)